



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Wacana Komunikasi Persuasif dan Transparansi Informasi dalam Krisis Pembangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny

Arya Yudha Prakoso¹, Azwar Azwar², Ana Kuswantini

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2510422022@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, azwarstmalaka@upnvj.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, anakuswanti@upnvj.ac.id

Corresponding Author: 2510422022@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract: *The crisis surrounding the development of Islamic boarding schools (pesantren) is not only a technical problem but also a communication problem involving competing sources of legitimacy. Previous studies have examined crisis communication in public institutions, religious organizations, and pesantren, but limited attention has been given to how media discourse constructs the tension between scientific accountability and religious authority in a pesantren construction disaster. This study examines how persuasive communication and information transparency are represented in news discourse on the Al-Khoziny pesantren collapse, using Feyerabend’s epistemological anarchism as the analytical lens. This study employs qualitative research with a discourse analysis approach. The data consist of news reports published by DetikNews, Tempo, and BBC Indonesia on 7–8 October 2025, selected purposively for their relevance to the case and their inclusion of statements from victims’ families or their representatives. The analysis identifies competing scientific, legal, and religious rationalities and interprets how those rationalities shape public trust and responsibility claims. The findings show that persuasive communication rooted in religious authority can sustain acceptance of the crisis as a matter of faith, while demands for accountability rely on empirical and legal reasoning. The novelty of this study lies in connecting media discourse on a pesantren disaster with Feyerabendian epistemic pluralism and positioning transparency as an ethical condition for negotiating competing rationalities. The study argues that crisis communication in religious institutions should open a dialogic space that recognizes religious values without closing public access to critical and accountable information.*

Keyword: *persuasive communication, information transparency, public trust, pesantren crisis, epistemological anarchism.*

Abstrak: Krisis pembangunan pesantren tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan komunikasi yang melibatkan sumber legitimasi yang saling berkompetisi. Penelitian terdahulu telah membahas komunikasi krisis pada institusi publik, organisasi keagamaan, dan pesantren, tetapi kajian yang secara khusus menjelaskan bagaimana wacana media membentuk ketegangan antara pertanggungjawaban ilmiah dan otoritas religius dalam bencana pembangunan pesantren masih terbatas. Penelitian ini menganalisis bagaimana

komunikasi persuasif dan transparansi informasi direpresentasikan dalam pemberitaan mengenai ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny dengan menggunakan anarkisme epistemologis Feyerabend sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Data penelitian berupa pemberitaan DetikNews, Tempo, dan BBC Indonesia pada 7–8 Oktober 2025 yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi terhadap kasus dan keberadaan pernyataan keluarga korban atau perwakilannya. Analisis mengidentifikasi pertarungan rasionalitas ilmiah, hukum, dan religius serta menafsirkan pengaruhnya terhadap kepercayaan publik dan tuntutan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang berakar pada otoritas religius dapat mempertahankan penerimaan terhadap krisis sebagai persoalan keyakinan, sedangkan tuntutan pertanggungjawaban bertumpu pada penalaran empiris dan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penghubungan wacana media tentang bencana pesantren dengan pluralisme epistemik Feyerabend serta penempatan transparansi sebagai kondisi etis untuk menegosiasikan rasionalitas yang berbeda. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi krisis pada lembaga keagamaan perlu membuka ruang dialog yang mengakui nilai religius tanpa menutup akses publik terhadap informasi yang kritis dan akuntabel.

Kata Kunci: komunikasi persuasif, transparansi informasi, kepercayaan masyarakat, krisis pesantren, anarkisme epistemologis.

PENDAHULUAN

Krisis pembangunan pesantren dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa persoalan teknis pembangunan dapat berkembang menjadi persoalan komunikasi ketika pengelola, keluarga korban, pemerintah, dan masyarakat menggunakan dasar penilaian yang berbeda. Otoritas keagamaan memiliki posisi penting dalam membentuk pemaknaan terhadap suatu peristiwa. Pesan krisis tidak hanya bekerja melalui informasi faktual, tetapi juga melalui nilai, keyakinan, dan relasi sosial yang telah terbentuk. Pemikiran Paul Karl Feyerabend relevan untuk membaca situasi tersebut karena ia menolak anggapan bahwa satu metode atau satu bentuk rasionalitas dapat menjadi satu-satunya dasar dalam memahami pengetahuan (Feyerabend, 1975).

Sejumlah kajian menempatkan pluralitas pengetahuan dan konteks budaya sebagai unsur penting dalam komunikasi. Silva (2020) menunjukkan pentingnya membuka ruang komunikasi bagi pengetahuan non-saintifik, sedangkan Chen dan Wang (2020) menekankan bahwa komunikasi yang mengabaikan dimensi budaya dapat kehilangan daya persuasinya. D'Amico (2021) memperluas pandangan tersebut dengan menekankan pluralitas metodologis dalam komunikasi. Fernandes (2021) juga menyoroti persoalan dominasi pengetahuan tertentu atas pengetahuan lokal. Pandangan tersebut membantu menjelaskan mengapa pesan yang berbasis pada rasionalitas teknis tidak selalu menghasilkan penerimaan yang sama dengan pesan yang berakar pada nilai dan tradisi.

Kajian komunikasi publik juga menunjukkan bahwa ruang media dapat menjadi arena perebutan legitimasi pengetahuan. Haryanto (2021) menjelaskan bahwa bias rasionalitas dalam komunikasi modern dapat menciptakan jarak antara lembaga dan publik, sedangkan Muller (2022) melihat media sebagai ruang epistemik tempat berbagai klaim kebenaran berkompetisi. Sari dan Rahman (2022) menegaskan bahwa komunikasi publik membawa makna sosial yang memengaruhi pembentukan kepercayaan. Trujillo (2023) menunjukkan kuatnya pengaruh narasi emosional dalam pembentukan kepercayaan publik, sementara Lee (2023) menempatkan media digital sebagai ruang validasi kebenaran yang semakin plural. Abbas dan Noor (2024) serta Putri (2025) memperkuat argumen bahwa komunikasi lintas

budaya dan institusi keagamaan memerlukan pengakuan terhadap rasionalitas jamak dan transparansi moral.

Sejumlah penelitian terbaru juga memperlihatkan bahwa komunikasi krisis merupakan proses pembentukan makna. Surahmat, Dida, dan Zubair (2021) menunjukkan bahwa strategi komunikasi krisis dapat dibaca melalui struktur wacana dan perubahan posisi komunikator pada fase krisis. Sakhiyya et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi krisis di Indonesia bekerja sebagai tindakan diskursif yang membentuk pemaknaan publik melalui pilihan kata dan strategi bahasa. Pada organisasi keagamaan, Morehouse dan Austin (2022) menegaskan pentingnya mempertimbangkan identitas religius pemangku kepentingan dalam komunikasi krisis. Dalam konteks pesantren, Suhendri, Batubara, dan Wahyunisa (2026) menunjukkan bahwa komunikasi krisis dapat berlangsung secara hierarkis sekaligus konsultatif dengan bertumpu pada nilai tabayyun dan amanah.

Meskipun penelitian tentang komunikasi krisis, wacana media, dan komunikasi pesantren telah berkembang, masih terdapat ruang kajian pada hubungan antara wacana media mengenai bencana pembangunan pesantren dan pluralitas dasar pengetahuan yang digunakan publik untuk menilai krisis. Kajian yang ada lebih banyak membahas strategi komunikasi krisis pemerintah, komunikasi organisasi keagamaan, atau model komunikasi krisis pesantren, sedangkan pertarungan antara rasionalitas ilmiah-hukum dan rasionalitas religius dalam pemberitaan bencana pesantren belum banyak dibaca melalui anarkisme epistemologis Feyerabend. Research gap tersebut menjadi dasar penelitian ini. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan perspektif Feyerabend untuk membaca bagaimana komunikasi persuasif dan transparansi informasi berperan dalam negosiasi makna, kepercayaan, dan pertanggungjawaban pada kasus Pondok Pesantren Al-Khoziny.

Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana komunikasi persuasif dan transparansi informasi dalam krisis pembangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny melalui pemberitaan DetikNews, Tempo, dan BBC Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pemberitaan menghadirkan rasionalitas ilmiah, hukum, religius dan bagaimana otoritas kiai memengaruhi pemaknaan terhadap krisis serta bagaimana transparansi informasi berkaitan dengan pembentukan kepercayaan dan tuntutan pertanggungjawaban.

METODE

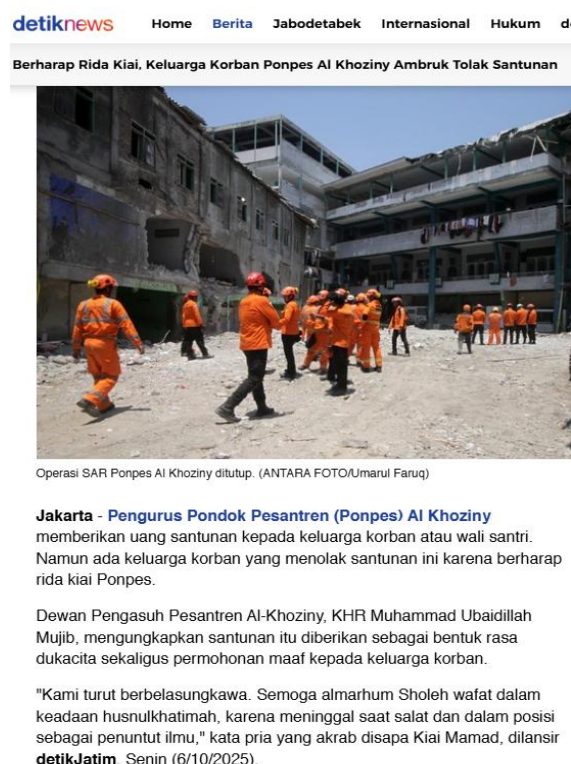
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari pemberitaan DetikNews, Tempo, dan BBC Indonesia mengenai ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Rentang data mencakup pemberitaan yang terbit pada 7–8 Oktober 2025, yaitu periode ketika ketiga media memberitakan respons keluarga korban, santunan, tuntutan pertanggungjawaban, dan pemaknaan religius terhadap peristiwa. Pemilihan media dilakukan secara purposive dengan tiga kriteria: pemberitaan secara langsung membahas kasus Al-Khoziny, memuat pernyataan atau respons keluarga korban atau perwakilannya, dan menyediakan narasi yang memungkinkan peneliti membaca perbedaan dasar pemaknaan terhadap krisis. Penggunaan media sebagai sumber data sekunder sejalan dengan penelitian komunikasi krisis yang memanfaatkan teks pemberitaan untuk membaca strategi dan konstruksi wacana (Surahmat et al., 2021; Jati & Husein, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap teks dan tangkapan layar pemberitaan yang relevan dengan fokus penelitian. Unit analisis penelitian adalah narasi berita yang memuat tiga aspek utama, yaitu konstruksi penyebab dan pertanggungjawaban, respons keluarga korban, serta penggunaan nilai atau otoritas religius dalam memaknai peristiwa. Peneliti membaca seluruh teks secara kontekstual, mengidentifikasi pernyataan yang menunjukkan rasionalitas ilmiah, hukum, dan religius, kemudian mengelompokkan pernyataan tersebut berdasarkan sumber legitimasi yang digunakan. Analisis wacana dilakukan dengan membaca hubungan antara pilihan narasi media, posisi aktor, dan makna

yang dibangun mengenai krisis. Pendekatan ini mengikuti prinsip bahwa komunikasi krisis merupakan praktik diskursif yang membentuk sense-making publik (Sakhiyya et al., 2024).

Tahap analisis dilakukan dalam empat langkah. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan menyeleksi bagian berita yang berkaitan langsung dengan penyebab, tanggung jawab, santunan, takdir, dan relasi santri-kiai. Kedua, peneliti mengategorikan data ke dalam rasionalitas ilmiah, hukum, dan religius. Ketiga, peneliti membandingkan pola narasi antar-media untuk melihat persamaan dan perbedaan sumber legitimasi yang digunakan. Keempat, peneliti menafsirkan temuan menggunakan konsep anarkisme epistemologis Feyerabend, terutama pluralitas pengetahuan dan kritik terhadap dominasi satu bentuk rasionalitas. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai bentuk pengetahuan hadir dalam komunikasi krisis tanpa menganggap bahwa seluruh klaim memiliki bobot evidensial yang sama (Bschir & Lohse, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Berita detik.com mengenai keluarga korban Pondok Pesantren Al-Khoziny

Analisis dimulai dari pemberitaan DetikNews yang menyoroti respons keluarga korban terhadap santunan dari pengurus Pondok Pesantren Al-Khoziny. Berita tersebut memperlihatkan dua orientasi makna yang berbeda. Di satu sisi, pemberian santunan dapat dibaca sebagai bentuk respons tanggung jawab lembaga terhadap keluarga korban. Di sisi lain, berita yang sama menunjukkan adanya keluarga yang menolak santunan karena mempertimbangkan rida kiai. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa tindakan terhadap krisis tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan material. Otoritas religius juga menjadi sumber legitimasi yang memengaruhi keputusan keluarga korban.

Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pesan mengenai tanggung jawab tidak diterima secara seragam. Ketika sebagian keluarga menempatkan rida kiai sebagai pertimbangan utama, komunikasi persuasif bekerja melalui kedekatan simbolik dan kepercayaan yang telah terbentuk dalam kultur pesantren. Posisi tersebut tidak dapat digunakan untuk meniadakan kebutuhan terhadap informasi mengenai penyebab kejadian dan proses pertanggungjawaban. Keberadaan dua orientasi tersebut menunjukkan perlunya

komunikasi yang mampu menghubungkan keyakinan religius dengan informasi faktual dan prosedur akuntabilitas.



Gambar 2. Berita Tempo mengenai keluarga korban Pondok Pesantren Al-Khoziny

Tuntutan Pertanggungjawaban dan Rasionalitas Ilmiah



Gambar 3. Berita Tempo mengenai dugaan human error dan tuntutan pertanggungjawaban keluarga korban

Pemberitaan Tempo memperlihatkan orientasi yang lebih tegas pada tuntutan pertanggungjawaban. Berita tersebut menampilkan proses evakuasi korban sekaligus pernyataan keluarga yang meminta agar kasus diproses secara hukum. Representasi tersebut menggeser pusat perhatian dari penerimaan terhadap musibah menuju pertanyaan mengenai sebab, tanggung jawab, dan tindakan korektif. Wacana pertanggungjawaban dalam berita ini menunjukkan bahwa keluarga korban tidak hanya membutuhkan penghiburan, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai proses pemeriksaan terhadap peristiwa yang menyebabkan korban meninggal.

Pernyataan Fauzi, salah satu perwakilan keluarga korban, memperkuat orientasi tersebut dengan menyebut dugaan human error dan kegagalan konstruksi sebagai persoalan yang perlu dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini memperlihatkan penggunaan rasionalitas empiris untuk menjelaskan peristiwa. Klaim tentang kegagalan konstruksi menempatkan penyebab bencana sebagai sesuatu yang dapat diperiksa melalui bukti material dan proses investigasi. Dengan demikian, wacana keluarga korban membangun dasar legitimasi yang berbeda dari wacana yang menempatkan peristiwa sebagai takdir. Perbedaan ini menjadi titik penting untuk membaca pluralitas pengetahuan dalam perspektif Feyerabend.

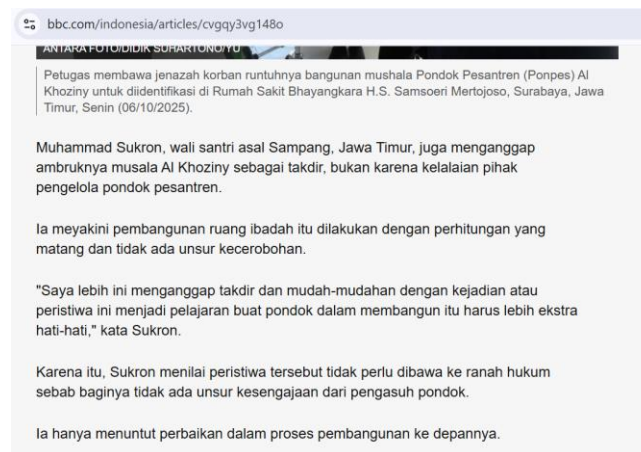
Fauzi menilai, sebagian orang tua korban memilih untuk diam dan mengikhhlaskan anak-anaknya yang menjadi korban. Hal ini terjadi karena kultur santri-kyai yang kuat. "Ini jadi hambatan orang tua untuk menuntut ini dan itu," ucapnya.

Menurut Fauzi, kejadian ini menjadi pelajaran untuk ke depan, termasuk untuk pondok pesantren lainnya. Terlebih, sebagian pesantren tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Saya baca tadi di berita, dari 45 ribu pesantren di Indonesia, hanya 50 yang punya IMB. Kejadian ini harusnya bisa dijadikan pelajaran agar pesantren lainnya tidak seperti ini," tuturnya.

Gambar 4. Penuturan keluarga korban Pondok Pesantren Al-Khoziny melalui berita Tempo

Kultur Santri-Kiai dan Rasionalitas Religius

Pemberitaan Tempo berikutnya memperlihatkan dimensi kultural yang memengaruhi respons keluarga korban. Fauzi menjelaskan bahwa sebagian orang tua memilih diam dan mengikhhlaskan anak-anak mereka karena kuatnya kultur santri-kiai. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan komunikasi tidak hanya lahir dari pertimbangan individual, tetapi juga dari relasi otoritas yang dibentuk oleh tradisi pesantren. Komunikasi persuasif kiai memiliki daya pengaruh karena pesan disampaikan oleh figur yang memperoleh legitimasi sosial dan religius. Daya persuasif tersebut juga perlu ditempatkan dalam ruang dialog agar penerimaan terhadap otoritas tidak menghilangkan hak keluarga dan publik untuk memperoleh informasi yang terbuka.



Gambar 5. Berita BBC Indonesia mengenai keluarga korban Pondok Pesantren Al-Khoziny

BBC Indonesia menghadirkan pernyataan Sukron, salah satu wali santri asal Sampang, yang memandang ambruknya Musala Al-Khoziny sebagai takdir dan bukan sebagai akibat kelalaian pengelola pesantren. Pernyataan tersebut memperlihatkan rasionalitas religius yang memberikan makna transendental terhadap peristiwa. Pada posisi ini, peristiwa dipahami melalui keyakinan dan penerimaan moral, bukan terutama melalui hubungan sebab-akibat teknis. Posisi tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai penolakan terhadap pengetahuan ilmiah. Sebaliknya, posisi tersebut menunjukkan bahwa publik menggunakan lebih dari satu kerangka pengetahuan ketika memberikan makna terhadap krisis.

Keempat pemberitaan tersebut memperlihatkan pertemuan tiga rasionalitas utama, yaitu rasionalitas ilmiah, rasionalitas hukum, dan rasionalitas religius. Rasionalitas ilmiah tampak dalam pembahasan mengenai dugaan kegagalan konstruksi; rasionalitas hukum tampak dalam tuntutan investigasi dan pertanggungjawaban; sedangkan rasionalitas religius tampak dalam penerimaan terhadap takdir, rida kiai, dan kultur santri-kiai. Ketiga rasionalitas tersebut tidak selalu berjalan searah. Sebagian keluarga menggunakan informasi dan tuntutan hukum untuk menilai tanggung jawab, sedangkan sebagian lainnya menggunakan keyakinan dan otoritas religius untuk menerima peristiwa. Kondisi ini memperlihatkan apa yang dalam perspektif Feyerabend dapat dibaca sebagai pluralitas epistemik yaitu pemaknaan terhadap realitas tidak hanya dibentuk oleh satu standar pengetahuan.

Perspektif tersebut juga mengubah cara memahami komunikasi persuasif kiai. Komunikasi persuasif dalam konteks pesantren tidak dapat dipandang hanya sebagai teknik memengaruhi sikap, tetapi sebagai praktik komunikasi yang bekerja di dalam struktur nilai dan otoritas tertentu. Ketika pesan kiai diterima karena kepercayaan religius, komunikasi tersebut memperoleh kekuatan dari legitimasi budaya yang sudah ada. Legitimasi tersebut tidak otomatis memenuhi tuntutan transparansi. Transparansi tetap diperlukan untuk menyediakan informasi mengenai fakta, penyebab, proses investigasi, dan langkah pertanggungjawaban. Komunikasi persuasif dapat menjaga kohesi sosial, sedangkan transparansi menjaga akuntabilitas publik.

Keterbukaan tersebut bukan berarti menolak ilmu pengetahuan atau menyamakan semua klaim sebagai benar. Feyerabend menolak dominasi satu bentuk rasionalitas sebagai satu-satunya jalan menuju pengetahuan. Karena itu, komunikasi krisis yang relevan dalam konteks pesantren harus mengakui bahwa publik memiliki pengalaman, nilai, dan keyakinan yang beragam, sekaligus menyediakan ruang untuk menguji klaim melalui informasi yang dapat diperiksa. Temuan ini sejalan dengan Bschr dan Lohse (2022) yang menempatkan pluralitas epistemik sebagai cara untuk menghindari dominasi satu perspektif dalam pengambilan keputusan. Transparansi menjadi mekanisme yang memungkinkan pluralitas tersebut berinteraksi tanpa menghilangkan kebutuhan terhadap pertanggungjawaban.

Temuan utama dan kebaruan penelitian ini menegaskan bahwa krisis komunikasi di Pondok Pesantren Al-Khoziny berlangsung melalui negosiasi antara rasionalitas ilmiah-hukum dan rasionalitas religius. Pemberitaan media tidak hanya merekam perbedaan pendapat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sumber legitimasi yang berbeda membentuk pemaknaan terhadap korban, tanggung jawab, dan penerimaan terhadap krisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan anarkisme epistemologis Feyerabend untuk menjelaskan bahwa komunikasi persuasif dan transparansi informasi harus dipahami sebagai dua praktik yang saling melengkapi yaitu komunikasi persuasif mempertahankan hubungan sosial berbasis nilai, sedangkan transparansi membuka ruang evaluasi kritis terhadap klaim dan tindakan lembaga. Model komunikasi seperti ini lebih memungkinkan terciptanya kepercayaan publik yang tidak hanya emosional, tetapi juga informasional dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis pembangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis bangunan. Pemberitaan DetikNews, Tempo, dan BBC Indonesia memperlihatkan adanya pertemuan dan ketegangan antara rasionalitas ilmiah, hukum, dan religius dalam memaknai peristiwa. Sebagian keluarga korban menempatkan dugaan kegagalan konstruksi dan tuntutan pertanggungjawaban sebagai dasar penilaian, sedangkan sebagian lainnya memaknai peristiwa melalui takdir, rida kiai, dan kultur santri-kiai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik dalam krisis dibentuk oleh lebih dari satu sumber legitimasi.

Pluralitas tersebut tidak perlu diposisikan sebagai pertentangan antara pengetahuan yang benar dan salah secara sederhana. Komunikasi krisis perlu menyediakan ruang dialog agar pengetahuan ilmiah, pengalaman keluarga korban, nilai budaya, dan keyakinan religius dapat hadir secara terbuka. Pada saat yang sama, pluralitas pengetahuan tidak boleh menjadi alasan untuk menutup akses terhadap informasi faktual dan proses pertanggungjawaban. Karena itu, komunikasi persuasif yang berakar pada nilai religius perlu berjalan bersama transparansi informasi yang memungkinkan publik memahami fakta, menilai tindakan lembaga, dan mengawasi proses pemulihan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi krisis pada lembaga keagamaan akan lebih kredibel apabila mampu menjembatani legitimasi sosial-keagamaan dengan tuntutan keterbukaan, kritik, dan akuntabilitas publik.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sumber data yang seluruhnya berasal dari pemberitaan media. Penelitian tidak melakukan wawancara langsung dengan pengelola pesantren, keluarga korban, kiai, aparat, atau pihak teknis yang terlibat dalam pemeriksaan bangunan. Karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan penyebab teknis maupun tanggung jawab hukum atas ambruknya bangunan. Analisis hanya menjelaskan bagaimana sumber-sumber tersebut direpresentasikan dan dinegosiasikan dalam wacana media. Keterbatasan ini juga membuat penelitian belum dapat menggambarkan proses komunikasi internal pesantren secara langsung.

Saran

Penelitian berikutnya perlu memperluas sumber data melalui wawancara mendalam dengan pengelola pesantren, keluarga korban, tokoh agama, dan pihak yang terlibat dalam investigasi. Peneliti juga dapat menggunakan etnografi komunikasi untuk mengamati secara langsung bagaimana otoritas kiai, nilai religius, dan praktik transparansi bekerja dalam kehidupan pesantren. Selain itu, penelitian komparatif terhadap beberapa kasus krisis pesantren dapat dilakukan untuk menguji apakah pola pluralitas epistemik dan kebutuhan transparansi yang ditemukan dalam kasus Al-Khoziny juga muncul pada kasus lain.

Kerangka anarkisme epistemologis Feyerabend, situasi ini menggambarkan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas pengetahuan. Kebenaran tidak dapat diklaim oleh satu otoritas, baik ilmiah maupun religius, tetapi harus dihasilkan melalui dialog yang menghargai perbedaan pandangan. Komunikasi publik pesantren sebaiknya bergerak menuju model yang terbuka, partisipatif, dan reflektif sebuah bentuk komunikasi yang mampu menjembatani antara nilai spiritual dan tanggung jawab ilmiah. Komunikasi yang ideal bagi lembaga keagamaan bukanlah komunikasi yang dogmatis, melainkan yang *anarkis epistemic* yaitu berani melibatkan banyak suara, menghormati keyakinan lokal, dan sekaligus terbuka terhadap kritik rasional. Hanya melalui cara inilah kepercayaan publik dapat dibangun secara otentik dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abbas, N., & Noor, H. (2024). Cross-cultural communication and moral transparency in religious institutions. *Journal of Intercultural Communication Studies*, 28(2), 145–162.
- BBC News Indonesia. (2025, 7 Oktober). Bangunan pesantren roboh di Sidoarjo: Santunan ditolak, keluarga korban berharap berkah kiai. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgqy3vg148o>
- Bschor, K., & Lohse, S. (2022). Pandemics, policy, and pluralism: A Feyerabend-inspired perspective on COVID-19. *Synthese*, 200, Article 441. <https://doi.org/10.1007/s11229-022-03923-4>
- Chen, L., & Wang, J. (2020). Cultural epistemology in Asian science communication. *Asian Journal of Communication*, 30(4), 301–318.
- D'Amico, F. (2021). Pluralistic methodology and communication ethics. *International Review of Communication Research*, 9(3), 45–60.
- Devi, A. (2025, 7 Oktober). Berharap rida kiai, keluarga korban ponpes Al Khoziny ambruk tolak santunan. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8149027/berharap-rida-kiai-keluarga-korban-ponpes-al-khoziny-ambruk-tolak-santunan>
- Fernandes, R. (2021). Anarchism and knowledge diversity in postcolonial communication. *Global Media Journal*, 19(1), 78–95.
- Feyerabend, P. K. (1975). *Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge*. Verso.
- Haryanto, T. (2021). Rasionalitas dan bias modern dalam komunikasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia*, 6(2), 201–219.

- Jati, G. P., & Husein, R. (2025). Discourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in Jambi, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(3), 687–702. <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i3.19365>
- Lee, M. (2023). Social media and the fragmentation of truth in post-truth society. *Journal of Digital Communication*, 12(1), 67–88.
- Morehouse, J., & Austin, L. L. (2022). The impact of religion in Situational Crisis Communication Theory: An examination of religious rhetoric and religiosity. *Journal of Media & Religion*, 21(2), 105–123. <https://doi.org/10.1080/15348423.2022.2059327>
- Muller, J. (2022). Epistemic spaces and media authority. *Communication Theory*, 32(2), 124–142.
- Putri, A. (2025). Transparansi informasi dan etika komunikasi lintas budaya di pesantren. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 1–20.
- Sakhiyya, Z., Saraswati, G. P. D., Anam, Z., & Azis, A. (2024). What's in a name? Crisis communication during the COVID-19 pandemic in multilingual Indonesia. *International Journal of Multilingualism*, 21(2), 1169–1182. <https://doi.org/10.1080/14790718.2022.2127732>
- Sari, L., & Rahman, F. (2022). Social meaning and trust in religious public communication. *Indonesian Journal of Communication Studies*, 8(3), 56–73.
- Septiana, H. (2024, 8 Oktober). Keluarga korban ambruknya ponpes Al Khoziny tuntutan pertanggungjawaban. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/keluarga-korban-ambruknya-ponpes-al-khoziny-tuntut-pertanggungjawaban-2076915>
- Silva, P. (2020). Feyerabend and inclusive science communication. *Philosophy of Communication Journal*, 16(2), 95–110.
- Suhendri, S., Batubara, H. J., & Wahyunisa, W. (2026). Model komunikasi krisis berbasis nilai Islam di Pondok Pesantren Attibyan Deli Serdang. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 6(2), 157–176. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v6i2.12908>
- Trujillo, D. (2023). Emotion, belief, and public trust in post-truth communication. *Media Psychology Review*, 18(1), 34–50.